

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. & Laha, M.S. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak). *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8 No. 1, 63-72.
- Annur, C. M. (2023). Pendapatan Negara Rp2.240,1 Triliun per Oktober 2023, Ini Penyumbang Terbesar. Diakses pada 20 Maret 2024 melalui databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/pendapatan-negara-rp22401-triliun-per-oktober-2023-ini-penyumbang-terbesar.
- Direktorat Jendral Pajak. *Restitusi*. Diakses pada 20 Juni 2024 melalui <https://www.pajak.go.id/id/restitusi>.
- Fitriya. (2023). Restitusi Pajak: Contoh, Syarat, Cara Restitusi PPN dan PPh. Diakses pada 20 April 2024 dari <https://klikpajak.id/blog/cara-mengajukan-restitusi-ppn-di-e-faktur-dan-syaratnya/>.
- Handayani, Ruruh. (2022). Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Diakses pada 29 Mei 2024 dari <https://www.pajak.com/pajak/pahami-dengan-jelas-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/>.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- IBLAM. (2023). Pengertian APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses pada 11 Juni 2024 dari <https://iblam.ac.id/2023/12/03/pengertian-apbn-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/>.
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Pulungan, F.A. et al. (2024). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. 2 (1), 169-176.
- Putra, B. M. H. (2022). *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu Dan PKP Berisiko Rendah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara*.

Tangerang Selatan: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Satriya, I. W. B. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan (Memahami konsep-konsep dasar dalam kajian Perpajakan di Indonesia)*. Yogyakarta: PT Green Pustakan Indonesia.

Setiawan, R. Y. et al. (2024). *Metodologi Penelitian*. Padang: CV Gita Lentera.

Sarie, F. et al. (2023). *Metodologi Penelitian*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.

Sultan., Rahayu, H.C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. 5(1), 77-85.

Tambunan, A. H. (2022). Apa Itu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak?. Diakses pada 15 Juni 2024 melalui <https://www.pajakku.com/read/630d77e1767ce5265ee9379f/Apa-Itu-Pengembalian-Kelebihan-Pembayaran-Pajak>.

Widiastuti, N. P. E. (2021). *Aspek Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi: Ketentuan, Konsep, Soal, dan Jawab*. Yogyakarta: Deepublish.